

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Merauke

¹Andri Irawan, ²Firda Yunita Sari

¹ Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Indonesia

²SMA negeri 1 Merauke, Indonesia

Email. andrirawan@unmus.ac.id

(Diterima September 2025); Disetujui September 2025); Dipublikasikan September 2025)

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan desain studi evaluatif, melibatkan kepala sekolah, guru, pengawas, siswa, dan orang tua sebagai informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran dan proyek P5, serta analisis dokumen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka efektif meningkatkan partisipasi siswa, kreativitas, dan pembelajaran kontekstual pada sekolah yang memiliki infrastruktur memadai, namun efektivitas tersebut tidak merata di sekolah pinggiran. Dari sisi efisiensi dan kecukupan, kebijakan belum optimal karena keterbatasan TIK, variasi kompetensi guru, dan kebutuhan pedagogik siswa yang beragam. Pemerataan juga menjadi isu serius, terlihat dari disparitas akses teknologi, pelatihan, dan peluang proyek P5 antara sekolah kota dan pinggiran. Responsivitas kebijakan tinggi terhadap kebutuhan siswa, tetapi rendah terhadap kebutuhan guru dan sekolah. Secara filosofis kebijakan ini tepat, tetapi secara operasional belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi Merauke. Penelitian menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi transformasi pembelajaran, namun membutuhkan dukungan struktural agar implementasinya lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Kebijakan Pendidikan; Profil Pelajar Pancasila.

Abstract

This study evaluates the implementation of the Merdeka Curriculum Policy in public senior high schools (SMA Negeri) in Merauke Regency using William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Employing a qualitative evaluative design, the study involved principals, teachers, supervisors, students, and parents selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, classroom and P5 project observations, and analysis of school documents. The findings indicate that the Merdeka Curriculum is effective in enhancing student participation, creativity, and contextual learning in schools with adequate infrastructure, yet its effectiveness is uneven in schools located in peripheral areas. In terms of efficiency and adequacy, the policy has not been fully optimal due to limited ICT resources, varying teacher competencies, and diverse pedagogical needs of students. Equity issues are evident, as technological access, teacher training, and P5 opportunities differ significantly between urban and rural schools. The policy is responsive to student learning needs but less responsive to the needs of teachers and schools, which experience increased administrative burdens and limited technical support. Although appropriate philosophically for the Merauke context, operational challenges hinder its full relevance. Overall, the Merdeka Curriculum holds strong transformative potential but requires strengthened structural support to ensure effective and equitable implementation.

Keywords: Policy Evaluation; Independent Curriculum; Education Policy; Pancasila Student Profile.

PENDAHULUAN

Pendidikan Indonesia tengah mengalami transformasi besar melalui penerapan Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, otonomi guru, diferensiasi instruksional, dan penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Meskipun kebijakan ini memiliki landasan filosofis yang kuat, implementasinya di berbagai daerah menghadapi dinamika yang berbeda, terutama di wilayah geografis yang terpencil dan multikultural seperti Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Kabupaten Merauke memiliki karakteristik geografis dan sosiokultural yang unik: wilayah yang sangat luas, banyak sekolah berada jauh dari pusat kota, keterbatasan akses internet dan teknologi, serta keragaman budaya yang tinggi. Kondisi tersebut membuat kemampuan tiap sekolah dalam menyiapkan perangkat ajar, mengelola administrasi digital, serta menyelenggarakan pembelajaran kontekstual sangat bervariasi. Realitas lapangan menunjukkan bahwa ketidaksiapan guru, minimnya literasi digital, dan keterbatasan sarana-prasarana menjadi faktor dominan yang memengaruhi mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Merauke.

Selain itu, pelaksanaan P5 yang mensyaratkan kolaborasi dengan komunitas, organisasi eksternal, dan pihak terkait lainnya, kerap terkendala oleh jarak geografis antarwilayah, minimnya mitra lokal, serta beban administrasi guru. Banyak SMA Negeri di wilayah pinggiran Merauke belum mampu menyelenggarakan P5 secara optimal dan masih mereduksi proyek menjadi aktivitas kelas sederhana tanpa eksplorasi lapangan atau kolaborasi lintas pihak. Sebaliknya, sekolah-sekolah di pusat kota lebih cepat mengadopsi pola pembelajaran inovatif karena memiliki sumber daya manusia yang lebih lengkap dan akses pelatihan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan infrastruktur, kualitas guru, dan dukungan sistemik mempengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagaimana ditemukan pada penelitian lain tentang implementasi Kurikulum Merdeka di daerah berbeda, kesiapan aktor pelaksana dan kondisi struktural mempengaruhi efektivitas kebijakan. Hal ini menjadi relevan bagi konteks Merauke yang memiliki tantangan geografis dan budaya yang berbeda dari daerah lain.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan di tingkat lokal dan bagaimana konteks daerah mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Evaluasi menggunakan kerangka Dunn memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kualitas implementasi, hambatan, serta potensi perbaikan kebijakan pendidikan di Papua Selatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi evaluatif untuk menilai dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami proses, konteks, dan dinamika pelaksanaan kebijakan secara mendalam. Lokasi penelitian meliputi SMA Negeri di pusat kota dan wilayah pinggiran Merauke, yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan variasi kesiapan sumber daya, infrastruktur, dan karakteristik sosial-budaya.

Informan penelitian ditentukan melalui purposive sampling, meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru proyek P5, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengawas sekolah, siswa,

serta orang tua. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran dan proyek P5, serta analisis dokumen seperti modul ajar, ATP, dan laporan pelaksanaan P5. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan secara terus menerus yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Dimana dalam analisis data terdapat tiga aktifitas yaitu: condensation data, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Temuan lapangan menunjukkan bahwa di sejumlah SMA Negeri di pusat kota Merauke, penerapan Kurikulum Merdeka telah berhasil meningkatkan partisipasi siswa, kreativitas dalam proyek P5, serta relevansi materi dengan konteks lokal (misalnya budaya Marind, isu lingkungan, potensi lokal). Hal ini konsisten dengan prinsip efektivitas menurut Dunn — yaitu bahwa kebijakan harus “mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau tujuan dari tindakan” (Dunn, 2003:429).

Namun, di sekolah pinggiran/terpencil, efektivitas belum maksimal: pembelajaran sering kembali ke metode tradisional, proyek P5 disederhanakan, dan siswa tidak mendapatkan pengalaman kontekstual yang bermakna. Temuan ini mirip dengan laporan evaluasi kebijakan lain di daerah dengan keterbatasan sarana — bahwa efektivitas kebijakan bersifat parsial dan sangat tergantung kapasitas lokal.

Berdasarkan analisis efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini menunjukkan efektivitas yang bersifat parsial, di mana keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan kapasitas lokal masing-masing sekolah. Sekolah-sekolah di pusat kota mampu mencapai tujuan kebijakan sebagaimana digariskan Dunn—yakni peningkatan partisipasi siswa, kreativitas dalam proyek P5, dan relevansi pembelajaran dengan konteks lokal—karena memiliki infrastruktur, dukungan manajerial, dan kompetensi guru yang lebih memadai. Sebaliknya, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran menunjukkan efektivitas yang rendah, karena pembelajaran masih kembali ke pola tradisional, proyek P5 dijalankan secara minimal, dan siswa tidak memperoleh pengalaman belajar kontekstual yang menjadi inti Kurikulum Merdeka. Pola ini konsisten dengan temuan evaluasi kebijakan di daerah terbatas sarana, bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi sangat bergantung pada kapasitas implementor, dukungan fasilitas, serta kondisi sosial-geografis setempat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka efektif pada konteks sekolah yang siap, namun belum mampu mencapai efektivitas merata di seluruh wilayah Kabupaten Merauke..

Efisiensi

Pada sekolah dengan fasilitas TIK dan akses baik, digitalisasi administrasi dan pembelajaran memungkinkan penghematan waktu dan biaya, sehingga kebijakan dijalankan secara efisien. Ini sejalan dengan literatur evaluasi kebijakan publik yang menunjukkan bahwa sumber daya (waktu, biaya, tenaga) dapat dikelola lebih baik jika ada infrastruktur mendukung dan manajemen yang baik.

Sebaliknya, di sekolah dengan keterbatasan, tuntutan penyusunan modul, administrasi manual, dan adaptasi kurikulum baru tanpa dukungan penuh menyebabkan inefisiensi — guru menghabiskan waktu lebih banyak, dan hasil pembelajaran tidak sebanding dengan usaha. Pola ini sering dijumpai dalam evaluasi kebijakan di daerah dengan disparitas.

Analisis terhadap aspek efisiensi menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kabupaten Merauke berjalan tidak merata, dengan tingkat efisiensi yang tinggi hanya pada sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas TIK memadai dan manajemen sekolah yang sudah terdigitalisasi, sehingga proses administrasi, penyusunan perangkat ajar, dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan lebih cepat dan hemat sumber daya. Kondisi ini selaras dengan pandangan para ahli evaluasi kebijakan yang menegaskan bahwa efisiensi sangat dipengaruhi oleh kelengkapan infrastruktur dan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya secara optimal. Sebaliknya, sekolah-sekolah dengan keterbatasan sarana menghadapi inefisiensi struktural karena guru harus bekerja lebih keras menyusun modul secara manual, berulang kali memperbaiki administrasi akibat gangguan jaringan, dan meluangkan waktu lebih banyak untuk adaptasi kurikulum tanpa dukungan teknis yang memadai; situasi ini membuat biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil pembelajaran. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa efisiensi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kesenjangan infrastruktur antar sekolah, sehingga kebijakan hanya efisien pada satuan pendidikan yang memiliki prasyarat teknologi dan manajerial yang kuat.

Kecukupan (Adequacy)

Salah satu tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah mengatasi kelemahan pembelajaran konvensional dan memfasilitasi pemulihan pembelajaran pasca pandemi melalui pembelajaran fleksibel, proyek, dan karakter. Di sekolah dengan pelaksanaan baik, proyek P5 berhasil mendorong kreativitas, kolaborasi, dan relevansi materi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan punya potensi kecukupan dalam menjawab kebutuhan perubahan pembelajaran.

Namun, karena kompetensi guru yang belum merata, keterbatasan perangkat TIK, dan latar belakang siswa yang sangat beragam (termasuk siswa asli Papua dengan keragaman budaya dan kebutuhan pedagogik khusus), kebijakan ini belum cukup menawarkan solusi menyeluruh atas persoalan mendasar pendidikan di Merauke — seperti kesenjangan literasi, numerasi, akses pendidikan berkualitas, dan adaptasi budaya. Penelitian evaluasi kebijakan di konteks serupa menunjukkan bahwa aspek kecukupan sering gagal bila kondisi lokal tidak mendukung.

Berdasarkan analisis kecukupan, implementasi Kurikulum Merdeka pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi memenuhi kebutuhan perubahan pembelajaran, terutama ketika proyek P5 dilaksanakan dengan baik dan mampu mendorong kreativitas, kolaborasi, serta relevansi materi dengan kehidupan siswa. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan di Merauke, karena keberhasilan kebijakan sangat dibatasi oleh kapasitas guru yang tidak merata, keterbatasan perangkat TIK, serta latar belakang siswa yang beragam, termasuk kebutuhan pedagogik khusus bagi siswa asli Papua. Kondisi ini menyebabkan Kurikulum Merdeka hanya mampu mengatasi sebagian kecil dari tantangan pembelajaran, tetapi belum menjangkau isu struktural yang lebih dalam seperti kesenjangan literasi, numerasi, dan akses pendidikan berkualitas. Temuan ini sejalan dengan hasil evaluasi kebijakan pada konteks serupa yang menunjukkan bahwa kecukupan kebijakan sering kali gagal tercapai apabila kondisi lokal tidak mendukung secara optimal, sehingga kebijakan belum dapat memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan pendidikan yang lebih kompleks.

Pemerataan (Equity / Distributional Fairness)

Salah satu kritik dalam literatur kebijakan publik adalah bahwa kebijakan nasional sering memperlebar ketimpangan lokal bila distribusi sumber daya tidak merata. Dunn (2018) sendiri menekankan pemerataan sebagai kriteria penting. Temuan di Merauke mendukung kritik tersebut: siswa di SMA di pusat kota memperoleh manfaat lebih besar dibanding siswa di sekolah pinggiran

— dari segi akses TIK, kualitas guru, kesempatan proyek P5 yang bermitra dengan eksternal, hingga pelatihan guru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, meskipun nasional, tidak diikuti distribusi sumber daya secara merata, sehingga memperkuat ketimpangan pendidikan antar wilayah (Irawan & Yunitasari, 2025).

Analisis terhadap aspek pemerataan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kabupaten Merauke belum mampu memenuhi prinsip *equity* sebagaimana dikemukakan Dunn, karena distribusi manfaat kebijakan jauh lebih besar dinikmati oleh sekolah-sekolah di pusat kota dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran. Kesenjangan akses TIK, kualitas dan jumlah guru, intensitas pelatihan, serta peluang kolaborasi dalam proyek P5 menyebabkan siswa di sekolah yang lebih tertinggal tidak memperoleh pengalaman belajar yang setara, sehingga kebijakan yang seharusnya menutup kesenjangan justru berpotensi memperlebar disparitas hasil pendidikan antar wilayah. Temuan ini memperkuat kritik dalam literatur evaluasi kebijakan bahwa kebijakan nasional tanpa dukungan distribusi sumber daya yang proporsional cenderung menghasilkan ketidakmerataan implementasi, di mana satuan pendidikan yang sudah kuat semakin berkembang, sementara sekolah yang kurang siap semakin tertinggal. Dengan demikian, dari perspektif pemerataan, Kurikulum Merdeka belum optimal memberikan akses dan manfaat yang sama bagi seluruh siswa, dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih afirmatif untuk mendukung sekolah-sekolah di daerah pinggiran Merauke.

Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan merespons kebutuhan dan aspirasi penerima manfaat (siswa, masyarakat) serta stakeholder pelaksana (guru, sekolah). Banyak siswa yang mengaku bahwa proyek P5 memberi pengalaman belajar yang bermakna, relevan dengan kehidupan lokal, dan memberi ruang ekspresi identitas budaya — menunjukkan bahwa kebijakan responsif terhadap kebutuhan siswa dan konteks lokal. Temuan ini sesuai dengan argumen dalam literatur bahwa kebijakan pendidikan harus bersifat kontekstual dan sensitif terhadap identitas lokal.

Namun dari sisi guru dan sekolah, responsivitas kebijakan kurang optimal. Tuntutan administratif meningkat, pelatihan tidak merata, dan dukungan teknis jarang bersifat berkelanjutan. Studi evaluasi kebijakan lain juga menemukan bahwa kebijakan sering responsif terhadap target pengguna akhir, tetapi kurang peka terhadap kebutuhan pelaksana (*street-level implementers*), sehingga muncul ketegangan antara desain ideal dan realitas pelaksanaan.

Analisis terhadap responsivitas menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri Kabupaten Merauke memiliki pola responsivitas yang tidak seimbang antara kebutuhan siswa dan kebutuhan pelaksana kebijakan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa proyek P5 berhasil memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa, terutama karena konten proyek dapat dikaitkan dengan budaya lokal, isu lingkungan, dan identitas masyarakat Merauke; hal ini menunjukkan bahwa kebijakan cukup responsif terhadap kebutuhan pembelajaran kontekstual yang diharapkan siswa. Akan tetapi, responsivitas kebijakan terhadap guru dan sekolah justru rendah, terlihat dari meningkatnya beban administratif, ketidakmerataan akses pelatihan, dan minimnya pendampingan teknis yang berkelanjutan. Situasi ini konsisten dengan literatur kebijakan publik yang menyebutkan bahwa banyak kebijakan cenderung memperhatikan penerima manfaat akhir tetapi mengabaikan kebutuhan pelaksana di level bawah, sehingga terjadi ketegangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas implementor. Dengan demikian, responsivitas Kurikulum Merdeka dapat dikatakan belum optimal secara keseluruhan, karena meskipun responsif terhadap kepentingan siswa, kebijakan kurang memfasilitasi kebutuhan

guru dan sekolah sebagai aktor kunci implementasi, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan kebijakan.

Ketepatan (Appropriateness / Relevansi Kontekstual)

Secara teoretis, Kurikulum Merdeka sangat tepat diterapkan di Merauke: pendekatan proyek dan pembelajaran kontekstual memungkinkan integrasi budaya lokal (misalnya kearifan Marind), lingkungan, dan identitas, sesuai aspirasi pendidikan kontekstual dan desentralisasi. Literatur policy evaluation menyarankan bahwa kebijakan harus sesuai nilai, kebutuhan, dan kondisi lokal agar relevan.

Namun dalam praktik, ketepatan implementasi terganjal oleh asumsi prasyarat: tersedia TIK, guru melek digital, sarana memadai, dan dukungan kelembagaan. Ketika prasyarat ini tidak terpenuhi — seperti di beberapa SMA pinggiran — kebijakan kehilangan relevansi operasional. Situasi ini tidak aneh; berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan ideal secara desain bisa gagal diterjemahkan secara tepat jika kondisi struktural tidak mendukung.

Analisis terhadap aspek ketepatan (appropriateness) menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka, dalam tataran desain, memiliki derajat kesesuaian yang tinggi dengan konteks sosio-kultural Kabupaten Merauke, karena pendekatan proyek dan pembelajaran kontekstual secara konseptual membuka ruang integrasi kearifan lokal Marind, relasi manusia–alam, serta penghargaan terhadap identitas budaya setempat. Hal ini selaras dengan pandangan teoritis dalam evaluasi kebijakan bahwa suatu kebijakan dikatakan tepat apabila selaras dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik lingkungan sosial tempat ia diimplementasikan. Namun temuan lapangan mengungkap adanya kesenjangan tajam antara ketepatan normatif di level desain dan ketepatan operasional di level pelaksanaan. Kurikulum Merdeka dibangun di atas serangkaian asumsi prasyarat – ketersediaan TIK, kompetensi digital guru, sarana pembelajaran memadai, serta dukungan kelembagaan yang kuat – yang dalam kenyataannya belum terpenuhi di banyak SMA, khususnya di wilayah pinggiran Merauke. Akibatnya, kebijakan yang secara filosofis relevan menjadi kehilangan daya guna praktis ketika dihadapkan pada keterbatasan struktural; guru kesulitan mengakses dan memanfaatkan platform digital, proyek P5 dipersempit menjadi aktivitas sederhana di kelas, dan peluang integrasi konteks lokal tidak dimaksimalkan. Pola ini mengonfirmasi temuan berbagai studi evaluasi kebijakan yang menyatakan bahwa kebijakan dengan desain ideal dapat gagal diterjemahkan secara tepat apabila mengabaikan kapasitas implementasi dan kondisi riil lapangan. Dengan demikian, dari perspektif ketepatan, Kurikulum Merdeka di Merauke dapat dinilai tepat secara nilai dan paradigma, namun belum tepat secara instrumentasi dan strategi implementasi, sehingga memerlukan adaptasi desain dan penguatan prasyarat struktural agar benar-benar relevan dan operasional di semua tipe sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada SMA Negeri di Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini menunjukkan capaian positif pada tingkat tertentu, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, kapasitas guru, dan kondisi struktural masing-masing sekolah. Dari aspek efektivitas, Kurikulum Merdeka terbukti mampu meningkatkan partisipasi siswa, kreativitas, serta kualitas proyek P5 pada sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur dan dukungan manajerial yang memadai. Namun efektivitas tersebut belum merata karena sekolah di wilayah pinggiran masih kembali pada pola pembelajaran tradisional akibat keterbatasan sarana dan kapasitas implementor.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka efektif dan relevan pada konteks sekolah yang siap, namun belum mampu menghasilkan implementasi yang efisien, merata, dan memadai di seluruh Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan struktural berupa peningkatan sarana TIK, pelatihan guru berkelanjutan, pengembangan strategi adaptasi lokal, dan kebijakan afirmatif untuk sekolah di wilayah pinggiran agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara menyeluruh dan berkeadilan.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.

Djuwita, T. M. (2018). An evaluation of policy implementation on minimarket management in Bekasi Regency. *Proceedings of the International Symposium on Social Sciences, Humanities, Education, and Religious Studies*, 3(1), 117–125.

Irawan, A., & Yunitasari, F. (2025). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Merauke. *Jurnal Administrasi Karya Dharma Volume 4 Nomor 1 (2025) Maret 2025*, 4(1), 114–128.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Indonesia. (2022). *Kurikulum Merdeka: Pedoman pelaksanaan Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek.

Nadlir, A. (2022). Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(2), 145–158.

Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dynamics, analysis, and evaluation*. PT Elex Media Komputindo.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2021). *Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Wahyudi, A. (2021). Tantangan implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 55–67.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.